

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dominasi dolar Amerika Serikat (USD) telah berlangsung cukup lama yang menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan yang dirasakan negara-negara di dunia. Tren dedolarisasi timbul sebagai akibat dari fenomena dominasi dolar yang mendorong negara-negara untuk segera meninggalkan ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat dan mencari alternatif-alternatif baru dalam sistem pembayaran internasional. Pada tahun 2022, konflik militer antara Rusia dan Ukraina memicu sanksi ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Rusia. Situasi ini diartikan sebagai peringatan bahwa aset negara yang dinyatakan dalam dolar memiliki risiko yang sama apabila berada dalam situasi serupa di masa depan. Tiongkok menyampaikan kekhawatirannya dengan semakin gencar dalam melakukan langkah-langkah dedolarisasi, guna menghindari hal serupa terjadi pada negaranya. Melalui BRICS Tiongkok berupaya meninggalkan pengaruh dolar dan mencari alternatif-alternatif baru sebagai upaya dedolarisasi, khususnya sejak diberlakukan sanksi.

Tiongkok bersama BRICS telah melakukan langkah-langkah strategis dalam memerangi isu dedolarisasi. Dalam kurun waktu 2022-2023, langkah-langkah yang telah dilakukan ini antara lain: pengembangan *New Development Bank* (NDB), pembentukan perjanjian swap bilateral (BSA), dan pendirian *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS). Ketiga inisiatif ini secara kolektif mendukung tujuan dedolarisasi BRICS dengan memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih independen dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi mata uang global.

Melalui NDB, Tiongkok telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat penggunaan mata uang lokalnya, RMB, dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 2022, NDB mengalokasikan sebagian besar portofolio pembiayaannya untuk proyek-proyek yang menggunakan mata uang lokal, dengan Tiongkok menjadi pemimpin dalam hal ini. Contoh konkritnya adalah proyek-proyek seperti ekspansi bandara internasional dan pengembangan

jaringan jalan utama di Tiongkok, yang semuanya menggunakan RMB sebagai mata uang pendanaan. Selain itu, Tiongkok juga berperan dalam mendorong penggunaan RMB dalam penerbitan obligasi NDB, yang merupakan salah satu yang terbesar dan paling aktif di pasar obligasi RMB.

Dalam kurun waktu 2022-2023, Tiongkok telah memperbarui perjanjian swab bilateral (BSA) dengan Rusia dan UEA. Pertama, dengan Rusia, perjanjian swap bilateral telah menjadi krusial setelah gelombang sanksi keuangan yang diberlakukan Barat terhadap Rusia. Sanksi ini memaksa Rusia untuk mencari alternatif dalam pengelolaan keuangan mereka, dengan RMB menjadi salah satu pilihan utama sebagai mata uang cadangan. Kesepakatan swap dengan Tiongkok memungkinkan Rusia untuk mengakses likuiditas yuan lebih mudah, yang mendukung stabilitas keuangan dalam negeri dan memfasilitasi perdagangan bilateral yang meningkat pesat. Penyimpanan cadangan Rusia dalam RMB juga menunjukkan upaya diversifikasi dan ketahanan terhadap tekanan eksternal yang signifikan.

Selanjutnya adalah BSA dengan UEA, perjanjian swap bilateral telah memperkuat hubungan keuangan dan perdagangan antara kedua negara. UEA, sebagai mitra perdagangan terbesar Tiongkok di Timur Tengah, telah meningkatkan investasinya di Tiongkok dan menjadi pelopor dalam penggunaan RMB untuk transaksi internasional, termasuk dalam sektor energi. Penandatanganan MOU untuk pengembangan mata uang digital antara kedua negara menunjukkan kolaborasi yang lebih dalam terhadap bidang teknologi keuangan. Tiongkok menggunakan perjanjian swap mata uang ini untuk memperluas penggunaan internasional RMB, yang merupakan strategi dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat.

Pengembangan *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) menjadi kebijakan dedolarisasi yang lahir atas inisiatif Tiongkok untuk menawarkan alternatif terhadap dominasi sistem pembayaran global yang dikontrol oleh Barat, terutama SWIFT. Keanggotaan CIPS menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan 1304 peserta per Maret 2022, yang mencakup bank-bank dari berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Oseania, dan Amerika Selatan. Keanggotaan ini tidak hanya mencerminkan minat global terhadap penggunaan

CIPS sebagai alternatif SWIFT, tetapi juga strategi negara-negara anggota BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada sistem yang dikuasai oleh Amerika Serikat.

Dalam menghadapi tantangan dedolarisasi, Tiongkok menghadapi kompleksitas yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan RMB sebagai inti dari kebijakan dedolarisasi. Meskipun Tiongkok telah berupaya melakukan langkah strategis melalui BRICS, data-data yang diperoleh disajikan menunjukkan bahwa RMB masih jauh tertinggal dibandingkan dominasi dolar Amerika Serikat. Pada kuartal keempat tahun 2023, cadangan devisa RMB hanya mencapai 261,73 miliar USD, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, dolar AS tetap mendominasi dengan total cadangan devisa global yang lebih dari 6 triliun USD pada tahun yang sama.

Peran Tiongkok dalam BRICS, khususnya dengan memperkuat NDB dan CIPS, menunjukkan dorongan bersama untuk dedolarisasi di antara negara-negara berkembang. Langkah ini tidak hanya mencerminkan usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi mata uang global yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pembayaran alternatif yang lebih mandiri.

Dalam konteks geopolitik global, upaya Tiongkok dalam dedolarisasi perlu menjadi perhatian khusus bagi Amerika Serikat, terutama karena potensi pengaruhnya terhadap dominasi dolar dalam jangka panjang. Potensi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Tiongkok dalam memimpin aliansi BRICS. Kepemimpinan tidak langsung Tiongkok ini ditunjukkan dengan bagaimana Tiongkok berhasil dalam mengembangkan kebijakan dedolarisasinya melalui kerja sama BRICS, terutama setelah jatuhnya sanksi terhadap Rusia pada awal 2022.

Ketahanan Tiongkok terhadap tekanan ekonomi dari sanksi internasional juga menunjukkan keteguhan dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Secara keseluruhan, sementara Tiongkok masih jauh dari menyamai posisi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global. Namun langkah-langkah yang diambil Tiongkok dalam dedolarisasi menandai pergeseran lambat tetapi pasti menuju multi-polaritas dalam sistem moneter internasional. Progres ini tidak

hanya mempengaruhi Tiongkok sendiri, tetapi juga dinilai sebagai potensi perubahan besar dalam dinamika keuangan global di masa depan.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Praktis**

Dalam upaya memperkuat peran dalam dedolarisasi global, Tiongkok perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat penggunaan Renminbi (RMB) sebagai mata uang internasional dengan meningkatkan konversibilitas, likuiditas, dan aksesibilitasnya, yang dapat memudahkan perdagangan dan investasi global dalam RMB. Selanjutnya, Tiongkok terus mengembangkan inisiatif BRICS seperti *New Development Bank* (NDB) dan *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS), yang membantu memperluas penggunaan RMB dalam transaksi internasional serta mengurangi ketergantungan pada sistem SWIFT yang didominasi Barat. Selain itu, penguatan kerja sama bilateral melalui perjanjian swap mata uang dengan negara-negara juga menjadi langkah strategis lain. Tiongkok dapat memulai dengan meningkatkan intensitas BSA terhadap negara-negara BRICS terlebih dahulu, yang lebih lanjut perkembangan secara progresif dapat dilakukan dengan mitra negara-negara di seluruh dunia. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tiongkok tidak hanya dapat memperkuat dedolarisasi global tetapi juga merangsang pergeseran menuju sistem moneter internasional yang lebih seimbang dan beragam.

### **6.2.2 Saran Teoritis**

Melalui analisis data sekunder, penelitian ini dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Tiongkok dalam visi dedolarisainya melalui kerangka BRICS. Namun, untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dedolarisasi Tiongkok dan pengaruhnya terhadap dominasi dolar Amerika Serikat, penelitian selanjutnya dapat mengandalkan data-data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan ahli kebijakan dedolarisasi Tiongkok, ekonom internasional, dan pejabat pemerintah terkait. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan wawasan mendalam dan perspektif terbaru mengenai implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi Tiongkok.

Selain itu, survei dan kuesioner yang dirancang khusus dapat digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari para pelaku pasar, seperti bank, perusahaan multinasional, dan investor, yang berinteraksi langsung dengan kebijakan dedolarisasi Tiongkok.